

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan suatu negara terdapat satu hal yang penting yaitu pembangunan, dalam pembangunan suatu daerah dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam segala aspek Menurut (Muhammad Hasan, 2018) Pembangunan tidak akan lepas dari suatu peningkatan kemampuan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu nilai kemakmuran suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam pembangunannya jika pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terus meningkat secara stabil.

Dalam pembangunan suatu daerah peran pemerintah dan masyarakat perlu beriringan untuk dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Pemerintah memiliki wewenang dalam menerbitkan kebijakan ataupun terjun langsung dalam upaya percepatan pembangunan daerah, dan masyarakat yang memiliki peran utama dalam rangka pembangunan daerah. Pemerintah perlu mengalokasikan dana anggaran yang didapat dari pendapatan daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah. Peningkatan dan penurunan pendapatan daerah dapat menjadi permasalahan dalam program pembangunan yang dirancang pemerintah. Penurunan pendapatan daerah akan berdampak dalam anggaran yang akan digunakan dalam program pembangunan, dengan begitu pendapatan daerah perlu terus meningkat yang akan menjadi penunjang percepatan pembangunan daerah.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan pembangunan terbaik di Indonesia, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan tiap tahun selalu diraih oleh provinsi-provinsi di Jawa. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

pulau jawa merupakan pusat pembangunan di Indonesia. Penilaian PPD dilakukan dengan memperhatikan 4 hal yaitu pembangunan yang telah dicapai, bagaimana dengan *quality* dalam dokumen RKPD, progres dalam penulisan dokumen RKPD dan yang terakhir ialah inovasi.

Perekonomian di pulau jawa adalah penyumbang kontribusi yang sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia, dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi di pulau jawa merupakan tempat perputaran perekonomian bagi perekonomian nasional. Yang dimana pernyataan tersebut bisa dibuktikan dengan memperhatikan perkembangan produk domestik regional bruto di wilayah pulau jawa yang memberikan kontribusi melebihi 50% dalam perekonomian nasional, yang bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan dalam Milyar Rupiah, di Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun

No	Wilayah	2020	2021	2022
1	Pulau Jawa	6.365.139	6.598.252	6.948.624
2	Luar Pulau Jawa	3.838.402	4.641.042	4.891.153

Sumber: BPS Indonesia diolah

Dalam tabel diatas memperlihatkan bahwa output total PDRB dari tahun 2020 - 2022 wilayah yang berada di pulau jawa melebihi nilai total PDRB di wilayah luar Jawa, yang dimana wilayah tersebut didalamnya terdapat beberapa daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Provinsi Banten.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi dalam garis besar, semakin tinggi perkembangan dalam segi PDRB maka akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonominya. Begitu pula dengan PAD, yang dimana jika nilai PDRB bertambah maka PAD tersebut otomatis akan mengikuti pertumbuhan PDRB yang mana

pertumbuhan tersebut dikarenakan dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan kemampuan daerah dalam pembayaran pajaknya. Hal ini pun juga didukung dengan (Halim, 2004) yang menyatakan bahwasannya pendapatan asli daerah di pengaruhi oleh produk domestik regional bruto.

Menurut Todaro (Todaro P. M., 2000) menjelaskan bahwasannya pertumbuhan penduduk yang juga akan meningkatkan jumlah tingkat angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jumlah tenaga kerja yang bertambah maka akan meningkatkan output pendapatan perkapita yang akan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan berpengaruh dalam bertambahnya kebutuhan yang dibutuhkan daerah tersebut yang akan mempengaruhi output pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat jika terdapat peningkatan dalam segi jumlah penduduknya dan tingkat angkatan kerja hal ini akan meningkatkan pendapatan suatu daerah seperti peningkatan dalam pajak dan retribusi yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah, semakin banyak penduduk dan semakin banyak tingkat angkatan kerja maka akan secara langsung berpengaruh pada peningkatan pajak dan retribusi yang dimana pajak dan retribusi merupakan sumber utama PAD argumen tersebut dilandasi teori solow yang dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilandasi pada ketersediaan faktor-faktor yang memproduksinya seperti penduduknya, angkatan tenaga kerjanya, modal, dan juga teknologi.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah yang termasuk dalam golongan daerah yang digemari oleh wisatawan baik oleh pelancong domestik maupun internasional, selain Provinsi Bali. DIY dikenal sebagai provinsi dengan

sektor pariwisata yang terkemuka, menyajikan beragam tempat wisata menarik, termasuk pusat kerajinan tradisional yang memperkaya potensi pariwisata DIY. Provinsi Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir ini menurut BPS kunjungan wisatawan domestik mencapai rata-rata 5,2 juta per tahun, sementara kunjungan wisatawan asing mencapai rata-rata 382.000 per tahun. Keberhasilan ini sebagian besar dapat didistribusikan kepada peran proaktif pemerintah yang ditandai dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Rencana Pengembangan Pariwisata Yogyakarta 2012–2025. Hal ini menciptakan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata, melibatkan keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kawasan pariwisata salah satu hal yang dibutuhkan para wisatawan merupakan akomodasi atau tempat untuk singgah ataupun menginap yang dimana dapat berupa akomodasi hotel, jumlah hotel akan mempengaruhi seberapa banyak suatu daerah dapat menampung wisatawan, selain itu dengan adanya peningkatan dalam akomodasi hotel suatu daerah akan dengan secara langsung dapat memperoleh pajak daerah yang dibebankan pada pihak pemilik akomodasi hotel untuk membayar pajak hotel yang secara akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

pendapatan asli daerah merupakan salah satu variabel yang dapat mengukur kemampuan suatu daerah dapat dikatakan mandiri, kemandirian tersebut adalah dimana ketika pemerintah daerah mampu mengatasi kebutuhan daerahnya. Tingkat kemandirian suatu daerah yang rendah maka daerah tersebut juga membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Menurut (Halim, 2007) kemandirian keuangan

daerah tersebut dihasilkan melalui perbandingan dari pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.

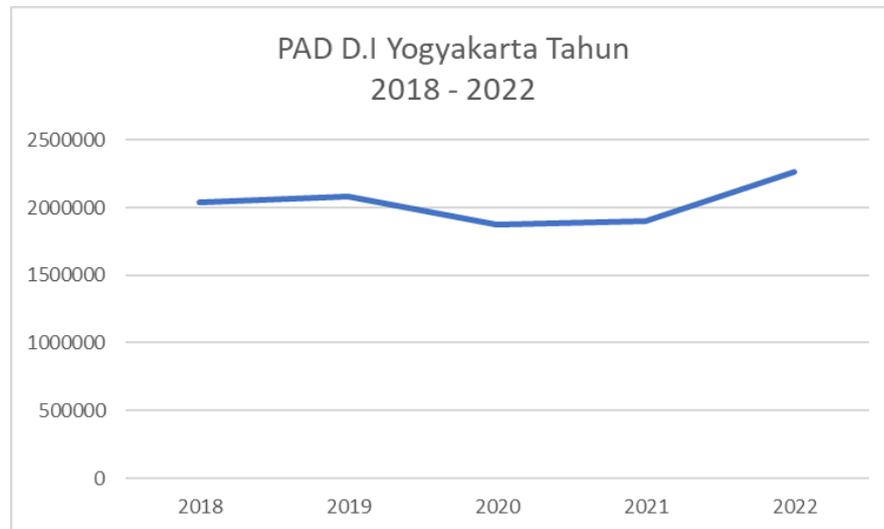
Tabel 1 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2022

Tahun	Provinsi di Pulau Jawa	RKKD
2022	DKI Jakarta	0,677
2022	Jawa Barat	0,699
2022	Jawa Tengah	0,672
2022	DIY	0,409
2022	Jawa Timur	0,666
2022	Banten	0,732

Sumber: BPS Indonesia diolah

Dari hasil pengolahan data rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi dengan nilai RKKD ter-endah dipulau jawa dengan nilai rasio kemandirian 40% hasil ini mengatakan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta masih mengandalkan pemerintah pusat sebagai penyokong pemasukan daerahnya. Meskipun Provinsi D.I Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal akan sektor wisatanya ternyata hal tersebut belum mampu meningkatkan kemandirian pendapatan asli daerahnya yang dimana pendapatan daerahnya mayoritas masih di bantu oleh pemerintah pusat.

**Gambar 1 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018 -
2022**



Sumber: BPS Indonesia diolah

Dengan merujuk pada gambar 1.1 diatas terlihat bagaimana nilai pendapatan asli daerah DIY, cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 pendapatan asli daerah ditahun tersebut hasilnya terdapat penurunan yang besar dibandingkan dengan tahun lain yang dimana penurunannya mencapai -9,89%, ditahun 2021 pendapatan asli daerah D.I Yograkarta masuk ketahap pemulihan dan akhirnya pada tahun 2022 meningkat drastis 19,07%.

Pendapatan DIY merupakan provinsi dengan pendapatan yang terendah jika dibandingkan dengan daerah daerah provinsi lainnya yang berada di wilayah pulau jawa, hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang penulis miliki, bagaimana DIY dapat menjadi yang terendah dalam segi pendapatan asli daerahnya dan bahkan kontribusi tingkat kemendariaannya tidak lebih dari 50% saja. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan analisis ini sekaligus dapat menjadi peran dalam memperlihatkan sebenarnya faktor apa saja yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan

pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan periode tahun 2007 – 2022.

Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebutlah mengapa penulis ingin meneliti pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta dengan meneliti apa saja variabel yang dapat mempengaruhi variabel pada pendapatan asli daerah di daerah tersebut, selain itu meskipun PDRB dan pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta sama-sama ter-rendah tetapi terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan bahwa tidak terdapatnya hubungan antara variabel PDRB dan juga pendapatan asli daerah. Maka dari itu penulis ingin mengagkat penulisan proposal dengan judul tersebut dan harapannya penulisan dalam penelitian ini bisa menjadikan referensi atau memberikan pandangan baru untuk pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Apakah Jumlah Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan, dapat diperoleh tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kejra terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.4. Ruang Lingkup

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang ada penulis jabarkan, maka ruang lingkup pada penulisan penelitian ini adalah tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Hotel, Jumlah Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2007 - 2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Maka penulis harap dengan adanya penulisan penelitian ini dapat memberikan dampak yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis diharapkan penulisan ini mampu menjadi refensi bidang Ekonomi dan studi Pembangunan terutama dalam mencari pengaruh dari fenomena pendapatan asli daerah.

2. Bagi pihak lain, diharapkan bahwa penulisan ini mampu dijadikan kajian sebagai referensi bagi penulis yang ingin meneliti dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan penelitian.

3. Bagi pihak lembaga terkait, yakni pemerintah daerah Provinsi D.I Yogyakarta diharapkan penulisan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan ataupun kebijakan pembangunan daerah terutama dalam kemandirian perekonomian dengan menyusun perencanaan dan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.